

PEMBANGUNAN DESA: KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

Miftahul Hasanah¹, Abu Bakar^{2*}, Zulfiani³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : ¹miftam771@gmail.com, ²abu.bakar@uin-alauddin.ac.id, ³zulfiani.masud@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding author: Abu Bakar, email: abu.bakar@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Sustainable tourism development emphasises respect for local knowledge, traditions and values that live in the community. Therefore, community involvement in the tourism development process is important. This article aims to explain the extent of collaboration between the village government and the community in tourism development efforts in Pasimarannu, Sinjai. The findings are described in a descriptive qualitative manner whose data sources are obtained through observation, interviews and literature studies. The general conclusion is that the village government through BUMDes has implemented the tourism development of Marannu Beach according to the master plan. In the development effort, the village government and BUMDes collaborate with the community in managing Marannu Beach. This collaboration benefits all parties. This collaboration model is in line with the concept of sustainable development that requires community involvement in development planning.

Keywords: Development, Tourism, Collaboration, Village

ABSTRAK

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada penghargaan atas pengetahuan lokal, tradisi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata menjadi penting. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata di Pasimarannu, Sinjai. Temuan diuraikan secara kualitatif deskriptif yang sumber datanya diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Kesimpulan umum yang diperoleh adalah bahwa pemerintah desa melalui BUMDes telah melaksanakan pembangunan pariwisata Pantai Marannu sesuai master plan. Dalam upaya pengembangan itu, pemerintah desa dan BUMDes berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengelola Pantai Marannu. Kolaborasi ini memberikan keuntungan semua pihak. Model kolaborasi ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menghendaki adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kata Kunci: Pembangunan, Pariwisata, Kolaborasi, Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah tidak dapat memastikan keberlanjutan kebijakan pembangunan tanpa adanya kolaborasi dengan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi diperlukan agar visi pembangunan pemerintah dapat dicapai, baik di level nasional, daerah dan desa. Namun demikian, proses operasional di semua tingkatan pemerintahan harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan sekaligus sejalan dengan agenda pembangunan prioritas pemerintah (Tjahjono,

Murdiyanto, & Widayanto, 2021). Oleh karena itu, kami berusaha untuk menjelaskan sejauhmana kolaborasi antara pemerintah desa sebagai unit pemerintahan paling bawah dapat bekerjasama dengan masyarakat menyukseskan politik pembangunan terkait pengembangan pariwisata Pantai Marannu di desa Pasimarannu, Sinjai.

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, memberikan penjelasan bahwa desa atau penyebutan lainnya merupakan “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Definisi ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangga mereka dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat atas prakarsa masyarakat itu sendiri. Artinya, dalam proses pembangunan, desa dimungkinkan untuk lebih kreatif dan dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam kerangka mencapai pembangunan desa yang optimal dan terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, desa juga punya peran esensial dalam mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan desa sebagai bagian integral tercapainya tujuan otonomi desa (Pitono & Kartiwi, 2016; Lumempow, Posumah, & Kolondam, 2021; Habibi, 2022).

Pemerintah desa dan masyarakat perlu menyadari bahwa untuk mencapai otonomi desa yang mandiri akan menghadapi tantangan dan permasalahan kompleks, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan masalah lainnya. Langkah yang tepat adalah pemerintah desa dan masyarakat perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, terutama terkait perencanaan desa dan tata kelola sumber daya desa untuk kepentingan masyarakat (Wijayanti, 2021; Samaun, Bakri, & Mediansyah, 2022). Salah satu langkah yang umum ditempuh terutama desa-desa yang memiliki potensi lanskap alam yang indah secara visual, adalah mengembangkan desa wisata yang berbasis pada sumber daya alam untuk menarik wisatawan (Sudibya, 2018; Rahmatillah, Insyan, Nurafifah, & Hirsan, 2019). Begitupun desa-desa yang memiliki keunikan secara budaya, akan mengembangkan desa wisata yang basisnya adalah budaya. Beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan di Indonesia seperti *adventure tourism*, *agro tourism*, *culinary tourism*, *cultural tourism*, *ecotourism*, *marine tourism*, *spiritual tourism*, dan *village tourism* (Suwantoro, 2004; Syah, 2017).

Dalam pengembangan wisata desa, baik inisiatif berasal dari pemerintah desa atau masyarakat, diperlukan kolaborasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk mengubah dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Pada titik ini, poin pentingnya adalah

dalam pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dengan cara dilibatkan mulai dari perencanaan sampai proses implementasinya (Habibi, 2022). Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata tidak hanya peningkatan pendapatan asli desa semata, tetapi pemberdayaan juga dapat berjalan (Gautama, Yuliawati, Nurhayati, Fitriyani, & Pratiwi, 2020). Lalu bagaimana proses kolaborasi ini dapat berjalan dalam konteks politik pembangunan?

Pembangunan desa dari dalam menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari masyarakat desa sebagai aktor yang paling memahami dan mengenal situasi sehari-hari mereka. Konsep ini mengkritik pendekatan "pembangunan dari luar", namun tidak secara tegas mengabaikan peran pihak luar seperti akademisi, teknokrat, dan konsultan pembangunan. Sebaliknya, konsep ini menekankan bahwa aspek lokalitas harus menjadi dasar dalam proses pembangunan desa (Ardianto, 2019). Keterlibatan "orang luar" dapat dibenarkan sejauh keterlibatan mereka tidak mengesampingkan kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat desa. Pengalaman selama ini, kecenderungan pembangunan menggunakan perspektif "orang luar" untuk menggalakkan pembangunan di desa. Sehingga ada ketidakterhubungan antara apa yang dipahami oleh masyarakat desa sebagai "orang dalam" dengan "orang luar" (Maarif, Azis, & Setiani, 2013). Bagaimanapun juga, pembangunan bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil interaksi "orang dalam" dengan "orang luar" dalam proses politik yang berimplikasi secara politik (Ruslin, 2017).

Charles Fonchingong Che (2024) menjelaskan bahwa keadilan sosial dan pembangunan sosial harus dipahami melalui lensa pembingkai ulang yang melibatkan pengetahuan adat. Dimana keadilan ini berdiri di atas prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemberdayaan, dan kesetaraan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengetahuan adat bisa menjadi alat penting dalam memperkuat pembangunan sosial di masyarakat pedesaan. Dalam konteks pembangunan pariwisata, Roshis Krishna Shrestha dan Jean-Noel Patrick L'Espoir Decosta (2024) menempatkan pentingnya menghormati pengetahuan dan tradisi masyarakat untuk memastikan keberhasilan upaya kolaboratif menuju pariwisata yang berkelanjutan dan peka terhadap budaya. Ini perlu sebagai bagian upaya mendorong masyarakat agar mampu mengorganisir pembangunan lokal secara mandiri (Mosse, 2003).

Perspektif di atas dapat digunakan untuk memahami pembangunan wisata Pantai Marannu. Bagaimana Pantai Marannu dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah desa dan memastikan sejauh mana kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata pantai tersebut. Pantai Marannu terletak di desa Pasimarannu, kecamatan Sinjai Timur, kabupaten Sinjai. Pantai ini memiliki ciri khas berupa hamparan pasir hitam yang luas dan deretan pohon kelapa. Keberadaan

Pantai Marannu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Banyak penduduk Sinjai maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati suasana pantai. Sebagian besar warga di kawasan ini tertarik untuk membuka usaha, meskipun fasilitas di Pantai Marannu masih terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan data, kami melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil observasi dan wawancara kami gunakan sebagai data primer, sedangkan hasil studi pustaka digunakan sebagai data sekunder dan dicantumkan sebagai sumber rujukan. Informan yang kami wawancarai adalah informan kunci dan dicantumkan. Setelah data-data terkumpul, lalu direduksi untuk memastikan relevansi data dengan topik yang diteliti. Setelah proses reduksi data, lalu disajikan secara deskriptif dan menarik kesimpulan. Adapun lokasi penelitian adalah desa Pasimarannu, kecamatan Sinjai Timur, kabupaten Sinjai, provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL DAN DISKUSI

Pengembangan Pariwisata Pantai Marannu

Pantai Marannu memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, namun upaya ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai kendala. Salah satu masalah utama dalam pengembangan wisata Pantai Marannu adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kesesuaian Pantai Marannu sebagai destinasi wisata pantai, serta sejauhmana kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangannya.

Gambar 1. Master Plan Pantai Marannu



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Pengembangan objek wisata oleh pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun pengembangan sektor ini dimungkinkan jika ada kolaborasi

antara pemerintah desa dengan masyarakat. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan mengadakan musyawarah desa yang melibatkan semua aktor, seperti RT/RW, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku usaha, dan lembaga terkait (Sugiarto & Mutiarin, 2017). Hal ini bertujuan untuk membahas mengenai usulan tindakan yang perlu dilakukan sebelum program pengembangan desa wisata ditetapkan (Syarifudin & Ma'ruf, 2022). Musyawarah desa juga dapat berfungsi untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat terserap. Artinya, pelibatan ini tidak akan mengabaikan cara pandang, pengetahuan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses semacam ini sejalan dengan tuntutan pembangunan partisipatoris atau pembangunan dari dalam (Mosse, 2003; Ardianto, 2019).

Berbagai organisasi dan sektor berperan dalam kegiatan pariwisata, dengan hubungan yang rumit antara aspek sosial, politik, lingkungan, dan ekonomi. Industri pariwisata mencakup elemen-elemen kunci seperti destinasi, pemasaran, dan infrastruktur. Pemerintah daerah, wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal adalah beberapa pihak yang terlibat dalam industri ini. Agar pariwisata dapat berkelanjutan, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengembangannya (Shrestha & Decosta, 2024). Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, pihak-pihak terkait perlu menerapkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan wisatawan dan penduduk setempat (Febriandhika & Kurniawan, 2020).

Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, mengurangi angka kemiskinan, memperkenalkan diversifikasi ekonomi, membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan sektor-sektor lain, serta memberikan keuntungan lainnya. Mengingat banyaknya industri yang berhubungan dengan pariwisata, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangannya bisa menjadi langkah yang positif. Pentingnya peran serta masyarakat dalam industri pariwisata telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, terutama dalam Pasal 19. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu dan komunitas yang tinggal di sekitar objek wisata berhak memiliki peran yang sama pentingnya sebagai pengelola atau penerima manfaat, seperti pekerja, buruh, atau penerima tugas lainnya (Susanawati, Pristiria, & Astuti, 2019).

Selain kerjasama, tidak kalah pentingnya adalah kesiapan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup agar sarana dan prasarana dasar dapat terpenuhi. Dukungan semacam ini di tingkat desa harus diinisiasi oleh pemerintah desa sebagai stimulator dalam pengembangan pembangunan pariwisata (Alfianto & Fauzi, 2021). Dalam konteks desa Pasimarannu, pemerintah desa telah menyiapkan anggaran dalam skema pembiayaan. Andi Syamsul Bahri, Kepala Desa Pasimarannu menuturkan bahwa:

“InsyaAllah kedepannya wisata Pantai Marannu akan dikembangkan sampai ke tahap wisata yang lebih besar, sehingga akan diminati banyak pengunjung serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi, untuk sementara ini wisata masih dalam tahap proses perencanaan pembangunan. Anggaran untuk pembangunan wisata Pantai Marannu sebanyak satu milyar, adapun target pembangunannya nanti di tahun 2025.” (Bahri, 2023).

Sekalipun dalam tahap pengembangan, namun Pantai Marannu sudah ramai dikunjungi wisatawan. Oleh karena, pemerintah desa menyediakan listrik, toilet, mushola, dan perbaikan jalan untuk memudahkan wisatawan mengakses Pantai Marannu. Selain itu, pemerintah desa juga telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang fokus mengelola Pantai Marannu. Nina Asmarini, Direktur BUMDES, mengatakan bahwa “*BUMDES sebagai pengelola wisata memiliki visi misi khusus dalam pengembangan wisata Pantai Marannu, salah satu contohnya adalah dengan memulai penataan dan tata kelola pantai untuk menunjang nilai estetika* (Asmarini, 2023).” Untuk memaksimalkan pengelolaan Pantai Marannu, pemerintah desa dan BUMDes juga membentuk struktur kepengurusan, yakni kepala unit, sekertaris, bendahara, dan anggota-anggota. Pengurus ini yang mengelola loket karcis, toilet, parkir serta penunjang lainnya (Rizal, 2023).

Andi Syamsul Bahri menyatakan bahwa *master plan* pengembangan Pantai Marannu telah disusun, yang meliputi perbaikan jalan, renovasi kedai, pembangunan gazebo-gazebo, villa, tribun atau panggung, lapangan futsal, area parkir, pos jaga, area bermain, serta penambahan fasilitas lainnya untuk mempermudah dan membuat wisatawan merasa nyaman di Pantai Marannu. Pengembangan ini penting mengingat kondisi gazebo yang kurang menarik dan masih sangat sederhana. Diharapkan dengan adanya perubahan tersebut, Pantai Marannu dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan modern, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi lokal. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan nyaman bagi pengunjung dari berbagai usia.

Gambar 2. Gazebo di Pantai Marannu



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023.

Kolaborasi Antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata (Shrestha & Decosta, 2024), karena dapat menciptakan keberlanjutan dan memastikan bahwa hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Masyarakat sebagai pemilik dan pelaku utama di lapangan memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga, termasuk tentang budaya, tradisi, dan sumber daya alam yang ada. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pembangunan pariwisata akan lebih relevan dan sesuai dengan karakter desa (Ardianto, 2019).

Di sisi lain, pemerintah desa memiliki akses terhadap kebijakan, dana, serta kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan (Alfianto & Fauzi, 2021). Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi yang mengoptimalkan potensi desa dan memperkuat daya tarik pariwisata, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata juga bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap destinasi wisata yang ada. Dengan adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat, pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan lebih efektif, membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan memperkuat identitas serta budaya lokal (Shrestha & Decosta, 2024). Keberhasilan pembangunan pariwisata yang melibatkan kedua pihak ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan (Cahayani, Suhendri, Sayuti, & Azdin, 2024).

Dalam konteks pembangunan pariwisata di desa Pasimarannu, pemerintah desa telah mengadopsi pembangunan partisipatif atau kolaborasi dengan melibatkan masyarakat secara luas. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil wawancara kami dengan Andi Syamsul Bahri, bahwa:

“Untuk sementara ini kita betul-betul memberdayakan masyarakat, dan menyerahkan penuh kepada BUMDes dalam pengelolaan wisata dan bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Ketika diambil oleh pemerintah daerah kita kasihan kepada masyarakat khususnya penjual-penjual lapak karna mereka tidak diberi kebebasan lagi untuk menjual.” (Bahri, 2023).

Dari pernyataan tersebut kita bisa melihat bahwa pemerintah desa tidak ingin Pantai Marannu dikelola oleh pemerintah daerah. Namun dikelola oleh BUMDes dengan harapan BUMDes dapat membantu perekonomian masyarakat lewat pelibatan mereka dalam mengelola Pantai Marannu. Pelibatan masyarakat akan lebih efektif mengidentifikasi kebutuhan mereka dan merancang solusi yang relevan bagi pengembangan Pantai Marannu.

Masyarakat yang memperoleh manfaat dari pengembangan pariwisata Pantai Marannu juga mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah desa dan BUMDes. Sebagaimana disampaikan oleh Timang, pemilik kedai di Pantai Marannu:

“Alhamdulillah, dengan berjualan di sini setiap hari bisa membantu saya dan keluarga saya untuk keseharian, meskipun keadaan pantai masih begini. Apalagi jika sudah dikembangkan dan saya sendiri setuju dengan program pemerintah untuk pengembangan wisata ini karena semakin besar wisatanya maka berdampak juga bagi kami yang berjualan di pantai ini.” (Timang, 2023).

Pernyataan Timang di atas menggambarkan bahwa warga sangat mendukung pengembangan wisata Pantai Marannu karena dapat berdampak positif terhadap perekonomian mereka. Meskipun mereka menyadari bahwa fasilitas yang ada di pantai tersebut masih belum optimal, masyarakat berharap dengan adanya program pemerintah yang terencana, jumlah pengunjung akan meningkat, yang pada gilirannya dapat memperlancar perputaran ekonomi di Pantai Marannu.

Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program akan semakin meningkat, dan dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi pengembangan wisata di pantai ini. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai keterangan Rizal saat wawancara (Rizal, 2023). Sejalan dengan itu, BUMDes sebagai penanggungjawab pengelolaan Pantai Marannu juga telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk melibatkan masyarakat di Pantai Marannu. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUMDes, Nina Asmarini:

“Bentuk kerjasama BUMDes dan pemerintah desa yaitu dengan cara Pemdes mengelontarkan dana kepada BUMDes sebagai penyertaan modal untuk meningkatkan penghasilan unit usaha BUMDes. Kemudian di sini kita menjalin kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan memberdayakan masyarakat seperti masyarakat membuat kedai, *landang-landang* [bale-bale] dan

juga gazebo di Pantai Marannu. Kemudian hasil dari itu dimasukkan sebagian ke BUMDes. Adapun tarif dari gazebo yaitu 20 ribu, 15 ribu masuk ke pemilik gazebo dan 5 ribu masuk ke BUMDes begitupun dengan *landang-landang*, 15 ribu, 10 ribu masuk ke pemilik *landang-landang* dan 5 ribu masuk ke BUMDes. Jadi itu *landang-landang* sama gazebo, masyarakat yang buat jadi ada iuran masuk ke BUMDes.” (Asmarini, 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara masyarakat, pemerintah desa, dan BUMDes dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal. BUMDes memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi ekonomi di tingkat desa. Dengan adanya sinergi yang baik, pemerintah desa dapat memberikan dukungan kelembagaan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan BUMDes, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha lokal (Utomo & Purnamasari, 2021).

Gambar 3. *Landang-Landang/Bale-bale* di Pantai Marannu



Sumber: *Dokumentasi Pribadi, 2023.*

Nuraidah, pemilik gazebo dan lapak di Pantai Marannu mengatakan bahwa skema kerjasama yang dilakukan BUMDes tidak merugikan dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Sebagaimana dikatakan oleh Nuraidah, bahwa:

“Saya sebagai pemilik gazebo dan *landang-landang* sangat senang jika ada pengunjung yang menyewa punya saya. Artinya yang kita buat ini sangat bermanfaat bagi mereka yang datang berkunjung karena bisa ditempati sebagai tempat duduk-duduk sambil makan-makan bersama bersama keluarga. Kemudian hasil dari penyewaan ini saya bagi, ada masuk di BUMDes dan ada juga ke saya. Jadi ini termasuk bentuk kerjasama yang menguntungkan bagi saya sendiri.” (Nuraidah, 2023).

Pernyataan Nuraidah di atas menunjukkan bagaimana masyarakat, melalui pengelolaan gazebo dan *landang-landang*, dapat merasakan langsung manfaat dari kegiatan wisata. Dengan

menyewakan fasilitas tersebut, ia tidak hanya mendapatkan penghasilan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi kepada BUMDes yang mendukung pembangunan desa. Ini mencerminkan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara individu, BUMDes, dan pengunjung, serta menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa.

Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat mengaitkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata, seperti yang dilakukan oleh Nuraidah, sangat penting. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan meningkatkan keterampilan dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik di desa. Ini juga membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat penerimaan publik terhadap inisiatif pembangunan, menjadikan keikutsertaan masyarakat sebagai strategi yang cerdas dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sebagai hasilnya, kolaborasi yang saling menguntungkan ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat telah terjalin dengan baik, membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Secara sederhana, kerjasama ini meliputi: *Pertama*, pemerintah desa berperan sebagai penggerak utama dengan memberikan dana kepada BUMDes sebagai modal awal untuk dikelola. *Kedua*, BUMDes bertindak sebagai pengelola yang bekerjasama dengan masyarakat dengan cara memberdayakan mereka melalui penciptaan lapangan pekerjaan, yang dapat meningkatkan perekonomian desa. *Ketiga*, masyarakat diberdayakan dengan cara membangun sinergi yang saling menguntungkan, misalnya dengan membuat gazebo dan *landang-landang* yang kemudian disewakan. Hasil dari penyewaan ini dibagi dua, sebagian masuk ke BUMDes dan sebagian lagi diberikan kepada pemilik gazebo atau *landang-landang*.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Marannu dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, program pemerintah desa mengenai pengembangan wisata Pantai Marannu telah direncanakan secara matang dengan tujuan mengembangkan wisata ini hingga mencapai skala besar sesuai dengan *master plan* yang telah disusun. Program pengembangan ini mencakup renovasi kedai, gazebo, perbaikan jalan, pembangunan lapangan futsal, parkir, tribun, villa, warung kopi, pos jaga, serta penambahan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. *Kedua*, bentuk kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan BUMDes dalam pengembangan pariwisata dilakukan dengan cara

pemerintah desa menyediakan dana kepada BUMDes sebagai modal awal untuk meningkatkan pendapatan unit usaha BUMDes. BUMDes bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata Pantai Marannu, sementara itu kerjasama dengan masyarakat dilakukan dengan memberdayakan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wisata dan membantu mereka yang memiliki lapak di sekitar pantai. Sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat ini memperkuat potensi desa serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat desa, khususnya di Desa Pasimarannu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pakuncen. *Paradigma*, 10(1), 1-16.
- Ardianto, H. T. (2019). Kritik Pembangunan Desa dari Luar: Desa dan Proyek Pertambangan Skala Besar. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 36-58.
- Cahayani, M., Suhendri, A., Sayuti, M., & Azdin, U. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Prekonomian Warga di Desa Sukarare. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 3087-3096.
- Che, C. F. (2024). Reframing social justice through indigenous know-how: Implications for social development, policy and practice. *Global Social Policy*, 24(1), 5-24.
- Febriandhika, I., & Kurniawan, T. (2020). Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Implementasi Kebijakan. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(1), 1-11.
- Gautama, B. P., Yulawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.
- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 429-437.
- Lumempow, V., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103), 38-49.
- Maarif, S., Azis, A., & Setiani, P. (2013). Pembangunan Nasional : Kearifan Lokal Sebagai Sarana Dan Target Community Building Untuk Komunitas Ammatoa. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 26(3), 167-181.
- Mosse, D. (2003). The Making and Marketing of Participatory Development. Dalam P. Q. Ufford, & A. K. Giri, *A Moral Critique of Development: In Search of Global Responsibilities* (hal. 43-75). London: Routledge.

- Miftahul Hasanah, Abu Bakar, Zulfiani, *Pembangunan Desa: Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata, JSIPOL, Vol 4 Issue 3 No. 1 Juli 31, 2025*
- Pitono, A., & Kartiwi. (2016). (2016). Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan menuju pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 27-37.
- Rahmatillah, T. P., Insyan, O., Nurafifah, & Hirsan, F. P. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya Sebagai Media Promosi Desa Sangiang. *Jurnal Planoeearth*, 4(2), 111-116.
- Ruslin, I. T. (2017). Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 185-199.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18-33.
- Shrestha, R. K., & Decosta, J.-N. P. (2024). A Socio-Cognitive Approach to Multi-Stakeholder Collaboration for Indigenous Tourism Development: The Case of Nepal's Newars. *Journal of Travel Research*, 1-23.
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22-26.
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 1-38.
- Susanawati, N., Pristiria, R. A., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Conference on Public Administration and Society*, 1(1), 119-138.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Syah, F. (2017). Straregi mengembangkan Desa Wisata. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 335-341.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 10(2), 365-380.
- Tjahjono, W. S., Murdiyanto, E., & Widayanto, B. (2021). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata di kawasan hutan lindung. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 22(1), 103-113.
- Utomo, B. W., & Purnamasari, S. M. (2021). Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65-72.
- Wijayanti, P. (2021). *Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Selarang (Studi di Pasar Panggok Desa Selarang, Kesugihan, Cilacap)*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto: Purwokerto.

